

## Analisis pengaruh kualitas institusi dan FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN

Vaniandra Hanan, Prastowo\*

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author: [prastowo@uui.ac.id](mailto:prastowo@uui.ac.id)

---

**JEL Classification Code:**

E02, F21, O43

**Kata kunci:**

Pertumbuhan Ekonomi; FDI; Kualitas Institusi.

**Email penulis:**

[20313233@students.uui.ac.id](mailto:20313233@students.uui.ac.id)

**DOI:**

10.20885/JKEK.vol3.iss2.art3

**Abstract**

**Purpose** – This research aims to analyze the influence of institutional quality and FDI on economic growth in ASEAN countries.

**Methods** – The method used in this research is panel data regression using economic growth research variables namely GDP per capita, FDI and institutional quality measured through 6 indicators based on world government indicators including Control of Corruption (CC), Voice and Accountability (VA), Government Effectiveness (GE), Rule of Law (ROL), Political Stability (PS), Regulatory Quality (RQ) are sourced from the World Bank.

**Findings** – The research results show that Regulatory quality, Control of corruption, Voice and accountability, and Government effectiveness have a significant effect on economic growth in ASEAN countries. Apart from that, FDI also has a significant influence on economic growth in ASEAN countries.

**Implication** – The government improves the quality of institutions and ease of investment to increase economic growth.

**Originality** – This research contributes to economic development policies related to economic institutions and investment.

---

**Abstrak**

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas institusi dan FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN.

**Metode** – Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel data dengan menggunakan variabel penelitian pertumbuhan ekonomi yaitu GDP perkapita, FDI dan Kualitas institusi diukur melalui 6 indikator berdasarkan *world government indicators* meliputi Control of Corruption (CC), Voice and Accountability (VA), Government Effectiveness (GE), Rule of Law (ROL), Political Stability (PS), Regulatory Quality (RQ) bersumber dari World Bank.

**Temuan** – Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Regulatory quality*, *Control of corruption*, *Voice and accountability*, dan *Government effectiveness* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Selain itu, FDI juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN.

**Implikasi** – Pemerintah meningkatkan kualitas institusi dan kemudahan dalam investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

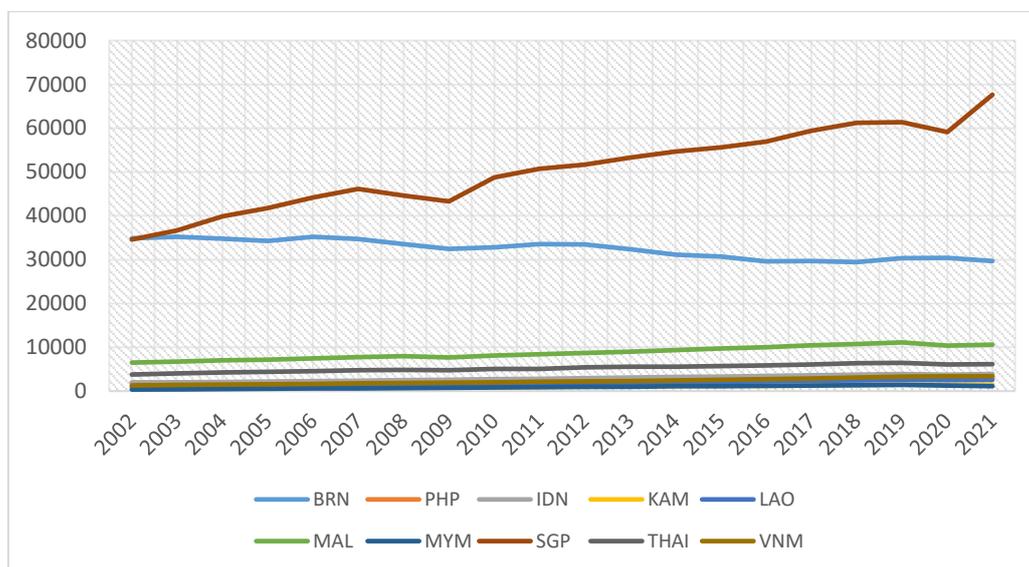
**Orisinalitas** – Penelitian ini berkontribusi terhadap kebijakan pembangunan ekonomi terkait kelembagaan ekonomi dan investasi.

---

## Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama sebagian besar pemerintahan di dunia. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi dapat mengevaluasi kinerja perekonomian suatu negara yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat (Ngo & Nguyen, 2020). Berdasarkan Mankiw (2007), pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui data Produk Domestik Bruto (PDB) yang menggambarkan seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh setiap individu di dalam suatu perekonomian. Namun, tidak semua negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan. Salah satu faktornya adalah terjadi ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya secara domestik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama ekonomi secara internasional, secara global maupun regional, agar dapat mendukung kebutuhan antar negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Sari & Kaluge, 2017). Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki kondisi geografis yang kuat dalam menghadapi masalah perekonomian global. Oleh karena itu, untuk memperkuat perekonomian, terbentuk organisasi regional yang bernama *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang meliputi 10 negara di Asia Tenggara, yakni Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Organisasi ini terbentuk untuk meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial-budaya antara negara-negara anggota. Hal tersebut dapat memperkuat ekonomi regional, sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta masyarakat ASEAN yang makmur dan sejahtera. Dengan demikian, kerjasama ekonomi regional ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi ASEAN dari awal hingga ke depannya (Sari & Kaluge, 2017).

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN menjadi fokus utama seiring dengan kemajuan ekonomi serta globalisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan Anam (2023), pertumbuhan ekonomi di kawasan negara ASEAN bergerak lebih cepat daripada kawasan lain. Berikut adalah data PDB Per Kapita di negara-negara anggota ASEAN dalam periode tahun 2002-2021.



Sumber: *World Development Indicators* (data diolah)

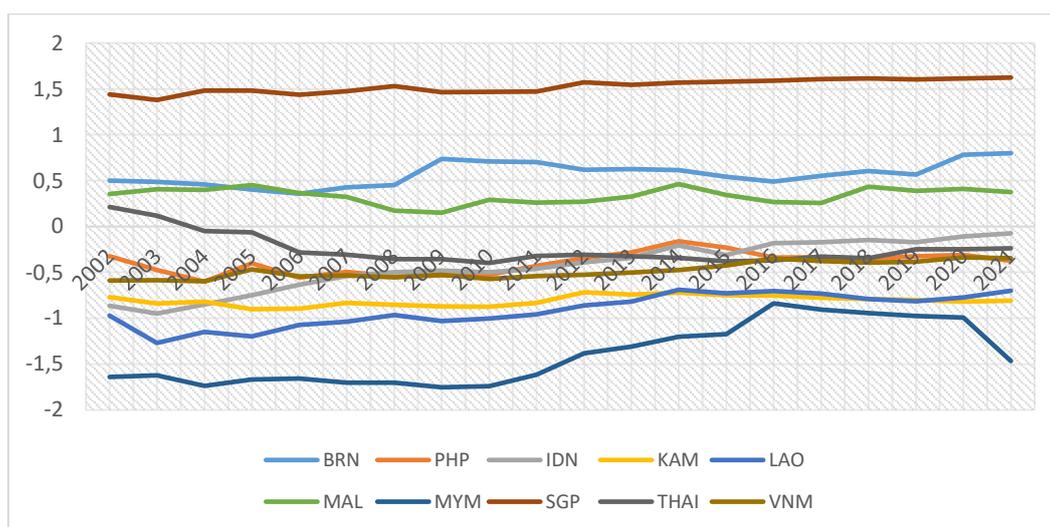
**Gambar 1.** Pertumbuhan Ekonomi pada Negara ASEAN Tahun 2002-2021

Berdasarkan dari Gambar 1. menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi yang terjadi antara negara-negara anggota ASEAN dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar negara anggota ASEAN merupakan negara dengan kategori pendapatan menengah ke bawah, yakni dengan pendapatan perkapita kurang dari 10.000 US Dollar. Nilai PDB Perkapita tertinggi dikuasai oleh Singapura dan disusul oleh Brunei Darussalam dan Malaysia. Singapura pada tahun 2021 memperoleh nilai tertinggi sebesar 67.638,65 US Dollar, sedangkan nilai rata-rata terendah diperoleh negara Myanmar dengan nilai sebesar 362,91 US Dollar. Keadaan ini

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan situasi ekonomi di masing-masing negara kawasan Asia Tenggara yang bertentangan dengan tujuan awal pembentukan ASEAN. Oleh karena itu, masing-masing negara diusahakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka melalui faktor-faktor tertentu agar tetap dapat bersaing dengan negara lain (Rahman & Jakaria, 2015).

Berdasarkan Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, seperti struktur kelembagaan nasional, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Dengan adanya kondisi kelembagaan yang solid, hal tersebut dapat menjadi pendorong untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Institusi berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, sebab institusi berfungsi sebagai sarana untuk mengatur serta mengawasi para pelaku ekonomi di pasar (North, 1991). Oleh karena itu, kualitas institusi menjadi salah satu variabel yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut World Bank (2023), tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan hasil dari pelaksanaan manajemen yang efektif dan bertanggung jawab serta sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan efisiensi pasar. Hal tersebut merupakan upaya untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran dana investasi serta mencegah korupsi, baik di ranah politik maupun administratif. World Bank juga telah merumuskan *World Governance Indicators* untuk menggambarkan tata kelola secara umum. Indikator tersebut meliputi *control of corruption, voice and accountability, government effectiveness, rule of law, political stability, dan regulatory quality* dengan skala penilaian dari -2,5 hingga 2,5. Berikut adalah data perkembangan kualitas institusi pada negara ASEAN periode tahun 2002-2021.



Sumber: *World Governance Indicators* (data diolah)

**Gambar 2.** Kualitas Institusi pada Negara ASEAN Tahun 2002-2021

Berdasarkan dari Gambar 2. menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kualitas institusi yang dimiliki antara negara-negara anggota ASEAN dari tahun ke tahun. Selaras dengan data sebelumnya, negara dengan kualitas institusi terbaik adalah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang relevan antara kualitas institusi dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, sebagian besar negara anggota ASEAN memperoleh nilai negatif pada kualitas institusi mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam pengelolaan pembangunan institusional di negara-negara anggota agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Negara-negara dengan kualitas institusi yang baik relatif menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, pertumbuhan sektor swasta, dan inovasi yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Kaufmann dkk, 2011).

Kinerja pemerintahan yang baik dan kualitas institusi yang tinggi akan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara (Ramadhan, 2019). Selaras dengan pernyataan tersebut, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan membahas terkait hubungan antara institusi dengan pertumbuhan ekonomi. Nawaz dkk (2014), Bayar (2016), dan Nguyen dkk (2018) menemukan bahwa institusi memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di

berbagai golongan negara. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tran dkk (2021) mengungkapkan bahwa diperlukan sifat *good governance* dalam sebuah institusi agar dapat terjadi perubahan yang maksimal serta positif pada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, terdapat penelitian dari Klomp & Haan (2009) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara institusi dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena Klomp & Haan (2009) melakukan penelitian menggunakan variabel *political stability*, *regime type*, dan *policy uncertainty* dalam memproksikan institusi, sehingga memberikan hasil hubungan yang negatif antara institusi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain kualitas institusi, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian sebuah negara, yaitu investasi dan tenaga kerja. Hellen dkk (2017) menjelaskan bahwa investasi berpotensi untuk meningkatkan pendapatan serta menumbuhkan kesempatan kerja di sebuah negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menanamkan modal, di dalam maupun luar negeri, sehingga proses industri menjadi lebih produktif serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Terdapat banyak penelitian yang mempelajari dampak investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut beberapa penelitian, *foreign direct investment* (FDI) secara relevan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di benua Asia, seperti Asia Tengah (Saidi dkk, 2020) serta Asia Tenggara dan Asia Selatan (Rao dkk., 2023). Selain itu, Dinh dkk. (2019) mendapatkan hasil bahwa FDI memiliki potensi untuk memperkuat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Selain investasi, tenaga kerja merupakan faktor yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketersediaan tenaga kerja dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila adanya populasi yang besar, tingkat pendidikan yang tinggi, dan keahlian yang terampil (Asrinda & Setiawati, 2022). Selain itu, tingkat partisipasi tenaga kerja juga menjadi faktor dalam menentukan tingkat investasi dan pengumpulan modal untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan populasi harus beriringan dengan peningkatan peluang kesempatan kerja agar dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia (Afif & Ciptawaty, 2020).

Kualitas institusi memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi antar negara yang berkaitan dengan faktor-faktor penting lainnya seperti investasi dan tenaga kerja. Dengan adanya institusi yang kuat dan efektif, negara dapat memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, inovasi, pemanfaatan sumber daya secara efisien, serta perkembangan sektor ekonomi yang beragam sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Acemoglu dkk 2005). Ketika laju investasi sebuah negara berkembang dengan baik, sering kali kualitas institusinya memiliki kondisi yang baik dan memiliki lingkungan yang mendukung bagi para investor. Demikian pula, kualitas institusi yang baik dapat mendorong peningkatan partisipasi tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang informasi di atas dapat membawa kesimpulan bahwa kualitas institusi, investasi, dan tenaga kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sudut pandang dari ukuran enam indikator kualitas institusi, yakni pengendalian korupsi, kebebasan bersuara, efektivitas pemerintah, supremasi hukum, stabilitas politik, dan kualitas regulasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh FDI dan kualitas institusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara ASEAN.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa dokumen-dokumen penelitian lain yang dapat mendukung topik yang akan dibahas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nawaz dkk (2014) yang membahas terkait dampak institusi terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di Asia dari periode 1996-2012 menggunakan data panel dinamis serta statis dengan sistem Generalized Method of Moment (GMM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa institusi berpengaruh pada perekonomian di Asia dalam jangka panjang, tetapi hanya efektif pada negara maju daripada negara berkembang. Studi lebih lanjut oleh Nguyen dkk (2018) dengan menggunakan metode yang serupa menganalisis dampak kualitas institusi pada pertumbuhan ekonomi di 29 negara berkembang di Asia. Hasil menunjukkan bahwa terdapat dampak yang positif dari kualitas institusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi kualitas institusi juga menghambat aliran *foreign direct investment* (FDI) dan perdagangan terbuka. Widianatasari & Purwanti (2021)

dalam penelitiannya juga memperjelas bahwa hanya kebebasan bersuara, stabilitas politik, efektivitas pemerintah, dan kualitas regulasi yang mempengaruhi kualitas institusi di negara-negara berkembang di Asia.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ngo & Nguyen (2020) membahas terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi, *total factor productivity* (TFP), dan institusi di 13 negara berkembang di benua Asia. Dengan menggunakan metode GMM, penelitian tersebut menemukan bahwa TFP dan institusi merupakan faktor penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatasi “*middle-income trap*” sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi. Lalu, Tran dkk (2021) juga membahas terkait pengaruh kualitas institusi terhadap pertumbuhan ekonomi di 48 negara Asia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dengan batas tertentu kualitas institusi merupakan faktor utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia juga dipengaruhi oleh inflasi, tenaga kerja, keterbukaan perdagangan, dan infrastruktur.

Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang menganalisis terkait hubungan institusi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara yang tergabung dengan organisasi Uni Eropa (UE). Penelitian yang dilakukan oleh Bayar (2016) menganalisis terkait hubungan antara pemerintah publik dengan pertumbuhan ekonomi pada 11 negara yang mengalami *transitional economies*. Dengan menggunakan metode regresi data panel dan model *random effect*, studi ini menyatakan bahwa peran institusi dalam mengendalikan tingkat korupsi dan supremasi hukum merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Selanjutnya, Radulovic (2020) menggunakan metode panel *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) menemukan bahwa setiap ukuran kualitas institusi di UE dalam jangka panjang memiliki pengaruh secara berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi daripada dalam jangka pendek.

Lebih lanjut, terdapat penelitian yang menganalisis terkait dampak *governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Asbarini dkk (2021) menggunakan analisis data panel dengan model *random effect* menemukan hasil bahwa pada tahun 2010-2019, efektivitas pemerintah, stabilitas politik, kualitas regulasi, dan supremasi hukum memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menggunakan metode yang serupa, Addainuri dkk (2023) menemukan hasil bahwa pada tahun 2017-2021, efektivitas pemerintah dan supremasi hukum di negara ASEAN memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terdapat penelitian yang berfokus untuk menganalisis terkait dampak dari *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ramadhan (2019) dengan menggunakan metode GMM menemukan hasil bahwa pada periode 2000-2018 pengendalian korupsi dan efektivitas pemerintah di Indonesia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, Widjanarko (2021) dengan menggunakan metode yang serupa menemukan hasil bahwa dalam periode 2013-2019 kebebasan suara dan stabilitas politik merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sisi lain, Hubbansyah dkk (2020) memperjelas apabila kualitas institusi di Indonesia memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasi. Terkait dampak modal (fisik maupun manusia) terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat analisis yang dilakukan mengenai pengaruh efektivitas tenaga kerja dan investasi asing langsung (FDI) dalam pertumbuhan PDB Perkapita di negara ASEAN oleh Saputra dkk (2021). Studi menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan investasi secara berkala akan meningkatkan permintaan tenaga kerja, sehingga akan menyebabkan peningkatan pada PDB Perkapita di setiap negara. Akan tetapi, Dinh dkk (2019) menyatakan bahwa dalam jangka pendek FDI dapat memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

## Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari situs resmi lembaga keuangan internasional World Bank. Data yang digunakan adalah data panel, dimana merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series*. *Cross-section* yang digunakan adalah 10 negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam) dan data *time series* meliputi periode waktu 2002-2021.

**Tabel 1.** Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber
PDB Per Kapita	GDPPC	US Dollar	World Bank
<i>Control of Corruption</i>	CC	-	World Bank
<i>Voice and Accountability</i>	VA	-	World Bank
<i>Government Effectiveness</i>	GE	-	World Bank
<i>Rule of Law</i>	ROL	-	World Bank
<i>Political Stability</i>	PS	-	World Bank
<i>Regulatory Quality</i>	RQ	-	World Bank
Investasi Asing Langsung	FDI	Persen	World Bank
Tenaga Kerja	LAB	Persen	World Bank

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis regresi panel data. Regresi panel data merupakan analisis regresi yang menggabungkan antara data *cross section* dan *time series*. Model persamaan yang ada di penelitian ini ditulis sebagai berikut:

$$GDPPC_{it} = \beta_0 + \beta_1 CC_{it} + \beta_2 VA_{it} + \beta_3 GE_{it} + \beta_4 ROL_{it} + \beta_5 PV_{it} + \beta_6 RQ_{it} + \beta_7 FDI_{it} + \beta_8 LAB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana GDPPC representasi Produk domestik bruto per kapita. kualitas institusi diukur melalui enam (6) indikator dengan indeks antara -2,5 (terburuk) hingga 2,5 (terbaik) berdasarkan *world government indicators*. Indikator yang digunakan meliputi *Control of Corruption* (CC), *Voice and Accountability* (VA), *Government Effectiveness* (GE), *Rule of Law* (ROL), *Political Stability* (PS), *Regulatory Quality* (RQ) yang diperoleh dari World Bank. FDI menunjukkan Penanaman Modal Asing dan LAB adalah tenaga kerja.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Deskriptif

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa pada variabel terikat, GDP per kapita (GDPPC), di 10 negara ASEAN pada tahun 2002-2021 memiliki nilai rata-rata sebesar 10.847,41 US Dollar. Untuk nilai tertinggi diperoleh negara Singapura di tahun 2021 dengan nilai sebesar 67.175,86 US Dollar. Sementara itu, negara Myanmar pada tahun 2002 memiliki nilai terendah dengan 364,002 US Dollar dan memperoleh nilai standar deviasi sebesar 16.312,28. Dari sisi variabel bebas, variabel *control of corruption* (CC) memiliki nilai indeks rata-rata sebesar -0,277. Nilai tertinggi sebesar 2,301 yang diperoleh negara Singapura pada tahun 2004, sedangkan nilai indeks terendah sebesar -1,673 yang diperoleh negara Myanmar tahun 2010. Standar deviasi yang diperoleh sebesar 1,00. Di sisi lain, variabel *voice and accountability* (VA) memiliki nilai indeks rata-rata sebesar -0,767. Terdapat nilai tertinggi sebesar 0,321 yang diperoleh negara Thailand pada tahun 2002 dan nilai terendah sebesar -2,233 yang diperoleh negara Myanmar pada tahun 2006 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,683.

**Tabel 2.** Deskripsi Data Penelitian

Variabel	Mean	Maks.	Min.	Std. Dev	n
GDP per kapita	10.847,41	67.175,86	364,002	16.312,28	200
<i>Control of corruption</i>	-0,277	2,301	-1,673	1,00	200
<i>Voice and accountability</i>	-0,767	0,321	-2,233	0,680	200
<i>Government effectiveness</i>	0,109	2,470	-1,628	1,014	200
<i>Rule of law</i>	-0,223	1,838	-1,736	0,890	200
<i>Political stability</i>	-0,155	1,600	-2,095	0,927	200
<i>Regulatory quality</i>	-0,040	2,252	-2,348	1,005	200
Investasi asing langsung	5,538	32,691	-1,320	6,180	200
Tenaga kerja	70,409	81,866	56,914	5,949	200

Sumber: data diolah

Pada variabel *government effectiveness* (GE), terdapat nilai indeks rata-rata sebesar 0,109. Singapura pada tahun 2008 memiliki nilai indeks tertinggi sebesar 2,470 dan Myanmar pada tahun

2010 memiliki nilai indeks terendah sebesar -1,628 dengan nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 1,014. Sementara itu, variabel *rule of law* (ROL) memiliki nilai indeks rata-rata sebesar -0,223. Nilai tertinggi diperoleh negara Singapura pada tahun 2019 dengan nilai indeks sebesar 1,838 dan nilai terendah diperoleh negara Myanmar pada tahun 2004 dengan nilai indeks sebesar -1,736. Standar deviasi yang diperoleh sebesar 0,890.

Variabel *political stability* (PS) memiliki nilai indeks rata-rata sebesar -0,155. Terdapat nilai indeks tertinggi sebesar 1,600 yang diperoleh negara Singapura pada tahun 2019 dan indeks terendah sebesar -2,095 diperoleh negara Myanmar pada tahun 2004 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,927. Lalu, pada variabel *regulatory quality* (RQ) memiliki nilai rata-rata indeks sebesar -0,040 dengan nilai tertinggi dari negara Singapura pada tahun 2015 sebesar 2,252 dan nilai terendah dari negara Myanmar pada tahun 2004 dengan nilai sebesar -2,349. Nilai standar deviasi sebesar 1,005.

Dari sisi investasi, variabel investasi asing langsung (FDI) di negara ASEAN pada tahun 2002-2021 memiliki nilai rata-rata sebesar 5,54 persen. Nilai tertinggi diperoleh negara Singapura pada tahun 2021 sebesar 32,69 persen dan nilai terendah sebesar -1,32 persen diperoleh negara Brunei Darussalam pada tahun 2016 dengan nilai standar deviasi sebesar 6,18. Sementara itu, variabel tenaga kerja (LABO) memiliki nilai rata-rata sebesar 70,41 persen. Nilai tertinggi diperoleh negara Vietnam pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 81,866 persen dan nilai terendah sebesar 56,91 persen diperoleh negara Filipina pada tahun 2020. Standar deviasi yang diperoleh sebesar 5,95.

### Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan uji chow dan hausman model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect. Hasil penelitian pada Tabel 3. menunjukkan beberapa variabel kualitas institusi yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel tersebut meliputi *control of corruption*, *voice and accountability*, *government effectiveness*, dan *regulatory quality*. Sementara itu, variabel yang tidak berpengaruh meliputi *rule of law* dan *political stability*. Di sisi lain, variabel investasi asing langsung dan tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN pada tahun 2002-2021.

**Tabel 3.** Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	-32.578,19	-6,817	0,000
CC	-3.219,169	-2,686**	0,008
VA	-3.531,169	-3,865**	0,000
GE	-2.759,136	-2,322**	0,021
ROL	2.419,849	1,819	0,070
PS	-274,534	-0,550	0,583
RQ	7.464,677	8,367**	0,000
FDI	371,061	6,585**	0,000
LAB	552,025	8,159**	0,000
R-squared	0,986		
Adjusted R-squared	0,985		
F-statistic	771,652**		
Chow test	133,344**		
Hausman test	398,549**		

Catatan: \*\*signifikan pada  $\alpha$  5% dengan uji dua sisi

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 3, variabel *control of corruption* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN pada tahun 2002-2021. Hal tersebut berarti apabila terjadi peningkatan pada kegiatan pengendalian korupsi maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif ini dapat terjadi karena adanya aktivitas korupsi ataupun kegiatan *rent seeking* yang memperlambat pertumbuhan ekonomi (Wibowo & Prasetya, 2013). Korupsi menyebabkan adanya kenaikan pada biaya, sehingga hal tersebut dapat menurunkan minat investasi masyarakat yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidakefektifan dalam

mengalokasikan sumber daya dalam proses produksi dan pembangunan juga dapat menyebabkan adanya penurunan efektivitas kegiatan produksi yang berpengaruh pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *voice and accountability* memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN pada tahun 2002-2021. Hasil tersebut selaras dengan penelitian dari Radulovic (2020) yang menyatakan bahwa akan terjadi penurunan dalam pertumbuhan ekonomi apabila partisipasi masyarakat dalam pemerintahan meningkat. Hubungan negatif ini terjadi karena adanya pendapat serta kepentingan dari kelompok masyarakat yang berbeda dengan “*self-interest*” masing-masing (Widianatasari & Purwanti, 2021). Dengan kata lain, meskipun terdapat kelompok lain yang mampu mengalokasikan sumber daya lebih baik, institusi yang memiliki kekuatan politik terbesar yang akan menjalankan tugasnya. Dengan demikian, konflik kepentingan antar kelompok akan muncul serta diikuti dengan adanya ketidakstabilan politik yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *government effectiveness* memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN pada tahun 2002-2021. Hasil tersebut selaras dengan penelitian dari Wibowo & Prasetya (2013) yang menyatakan bahwa akan terjadi penurunan dalam pertumbuhan ekonomi apabila kualitas pelayanan publik dan implementasi kebijakan di suatu negara meningkat. Hubungan negatif ini dapat terjadi ketika pemerintah bekerja dengan baik dan efisien, mereka dapat menjalankan program dan layanan bagi masyarakat dengan biaya yang lebih sedikit karena prosesnya menjadi lebih sederhana dan efektif. Hal ini mengurangi beban biaya bagi pemerintah dan masyarakat. Namun, dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat karena pemerintah mengeluarkan lebih sedikit uang untuk kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *rule of law* tidak menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN pada tahun 2002-2021. Hasil tersebut selaras dengan penelitian dari (Ramadhan, 2019) yang menyatakan bahwa tidak terjadi dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi apabila aturan hukum di suatu negara berubah. Hal ini disebabkan karena masih tingginya tingkat korupsi di negara ASEAN yang dapat mengurangi efektivitas dari aturan hukum yang berlaku. Meskipun telah dirancang kerangka hukum yang terstruktur, korupsi tetap dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar serta inefisiensi pengalokasian sumber daya yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Zhuo, dkk. 2021). Oleh karena itu, sebarang tingkat aturan hukum yang berlaku tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara anggota ASEAN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *political stability* tidak menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN pada tahun 2002-2021. Hasil tersebut selaras dengan penelitian dari Wibowo & Prasetya (2013) yang menyatakan bahwa tidak terjadi dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi apabila kestabilan politik di suatu negara berubah. Hal ini disebabkan karena indikator *political stability* hanya mengukur kualitas pemerintahan dari perspektif politik serta melibatkan alokasi anggaran untuk menjaga stabilitas politik. Dengan kata lain, negara anggota ASEAN masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi, penegakan hukum yang kurang tegas, serta didominasi oleh kekuatan kelompok elit (Aisen & Veiga, 2011). Oleh karena itu, stabilitas politik bukan merupakan faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *regulatory quality* memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN pada tahun 2002-2021. Hasil tersebut selaras dengan penelitian dari Addainuri dkk (2023) dan Asbarini dkk (2021) yang menyatakan bahwa akan terjadi kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi apabila kualitas regulasi yang berlaku di suatu negara meningkat. Hubungan positif ini dapat terjadi karena undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah sudah cukup baik sehingga berakibat pada kelancaran proses administrasi bisnis (Widianatasari & Purwanti, 2021). Dengan adanya kelancaran dalam proses administrasi, hal tersebut mempermudah sektor swasta dalam menjalankan bisnis yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Hal tersebut membuat kualitas regulasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *foreign direct investment* (FDI) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN pada tahun 2002-2021. Hasil tersebut selaras dengan penelitian dari Widianatasari dan Purwanti (2021) dan Dinh, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa akan terjadi kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi apabila arus investasi masuk dari negara lain di suatu negara meningkat. Hubungan positif ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan bahwa investasi mampu mendorong rencana pembangunan dari pemerintah, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan modal, teknologi, serta kesempatan kerja yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi negara. Begitupun sebaliknya, jika arus investasi yang masuk di suatu negara mengalami penurunan maka hal tersebut dapat menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan *CNBC Indonesia Research* (2023), Asia Tenggara merupakan kawasan incaran bagi investor asing. Dengan demikian, investasi asing memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN pada tahun 2002-2021. Hasil tersebut selaras dengan penelitian dari Afif & Ciptawaty (2020) dan Yogatama & Hidayah (2022) yang menyatakan bahwa akan terjadi kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi apabila partisipasi tenaga kerja di suatu negara meningkat. Hubungan positif ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan bahwa tingginya partisipasi tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga yang kemudian digunakan untuk kegiatan konsumsi, sehingga hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, menteri pendidikan telah merencanakan program untuk meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan melalui The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMO), sehingga partisipasi angkatan kerja meningkat yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Yogatama & Hidayah, 2022).

## Kesimpulan dan Implikasi

Hasil penelitian ini terkait pengaruh dari kualitas institusi yakni *control of corruption, voice and accountability, government effectiveness, rule of law, political stability, regulatory quality* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN selama tahun 2002-2021. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Regulatory quality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Sebaliknya, *Control of corruption, Voice and accountability, dan Government effectiveness* berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Selain itu, investasi asing langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Implikasi serta saran yang selaras dengan hasil penelitian, yakni sebagai berikut: pertama, pemerintah memastikan undang-undang dan peraturan yang berlaku diimplementasikan secara konsisten di seluruh tingkat pemerintahan untuk meningkatkan kepercayaan bisnis serta mencegah ketidakpastian yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Kedua, membangun sistem pengawasan yang efektif untuk memantau penggunaan anggaran publik dan perilaku pejabat negara. Ketiga, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik serta membuat keputusan secara adil. Keempat, meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dengan mengevaluasi kembali kebutuhan masyarakat, sehingga anggaran dapat dialokasikan secara tepat untuk kegiatan produktif. Selain itu, pemerintah untuk memperkuat stabilitas politik serta hukum yang berlaku untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman bagi para investor asing.

## Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Chapter 6 Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. (P. Aghion, & S. N. Durlauf, Eds.) *Handbook of Economic Growth*, 1, 385-472.
- Addainuri, M. I., Abidin, M., & Suci, L. E. (2023). Analisis Dampak Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(2), 155-172.

- Afif, F. Y., & Ciptawaty, U. (2020). Daya Saing Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang ASEAN. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, 9(1), 37-44.
- Aisen, A., & Veiga, F. J. (2011). How Does Political Instability Affect Economic Growth? *IMF Working Papers*, 1-28. Retrieved from IMF Working Papers.
- Anam, K. (2023, Oktober 06). *Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Kencang, Ini Peluang yang Tersimpan*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231007224150-4-478760/pertumbuhan-ekonomi-asean-kencang-ini-peluang-yang-tersimpan>
- Asbarini, N. F., Isnaini, L., & Wibowo, M. G. (2021). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 82-93.
- Asrinda, D., & Setiawati, R. I. (2022). Pengaruh Investasi Asing, Ekspor Neto, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 11(2), 50-58.
- Bayar, Y. (2016). Public Governance and Economic Growth in the Transitional Economies of the European Union. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*(48), 5-18.
- CNBC Indonesia Research. (2023, Oktober 13). Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231012114435-128-479977/asean-primadona-investasi-global>
- Dinh, T. T.-H., Vo, D. H., Vo, A. T., & Nguyen, T. C. (2019). Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Short Run and Long Run: Empirical Evidence from Developing Countries. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(4), 176.
- Hellen, Mintarti, S., & Fitriadi. (2017). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja. *INOVASI*, 13(1), 28-38.
- Hubbansyah, A. K., Sudarmaji, E., & Astuti, S. B. (2020, Desember). Dampak Kualitas Institusi Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Visionida*, 6(2).
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220-246.
- Klomp, J., & Haan, J. d. (2009). Political Institutions and Economic Volatility. *European Journal of Political Economy*, 311-326.
- Mankiw, G. N. (2007). *Makroekonomi Ed.6*. Jakarta: Erlangga.
- Nawaz, S., Iqbal, N., & Khan, M. A. (2014). The Impact of Institutional Quality on Economic Growth: Panel Evidence. *The Pakistan Development Review*, 53(1), 15-31.
- Ngo, M. N., & Nguyen, L. D. (2020). Economic Growth, Total Factor Productivity, and Institution Quality in Low-Middle Income Countries in Asia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 251-260.
- Nguyen, C. P., Su, T. D., & Nguyen, T. V. (2018). Institutional Quality and Economic Growth: The Case of Emerging Economies. *Theoretical Economics Letters*, 1943-1956.
- North, C. D. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 84(3), 359-358.
- Radulovic, M. (2020). The Impact of Institutional Quality On Economic Growth: A Comparative Analysis of the EU and Non-EU Countries of Southeast Europe. *ECONOMIC ANNALS*, 65(225), 163-181.
- Rahman, T., & Jakaria. (2015, Desember). Determinasi Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Media Ekonomi*, 23(3), 199-212.

- Ramadhan, M. (2019, November). Assessing Of The Impact Of Good Governance And Institutions On Economic Growth In Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 2594-2598.
- Rao, D. T., Sethi, N., Dash, D. P., & Bhujabal, P. (2023). Foreign Aid, FDI, and Economic Growth in South-East Asia and South Asia. *Global Business Review*, 24(1), 31-47.
- Saidi, S., Mani, V., Mefteh, H., Shahbaz, M., & Akhtar, P. (2020). Dynamic linkages between transport, logistics, foreign direct Investment, and economic growth: Empirical evidence from developing countries. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 141, 277-293.
- Saputra, R. A., Susilowati, D., & Arifin, Z. (2021, Februari). Efektivitas Tenaga Kerja dan Investasi Asing dalam Pertumbuhan PDB Perkapita Negara ASEAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 5(1), 63-74.
- Sari, A. C., & Kaluge, D. (2017, Februari). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Member Countries Pada Tahun 2011-2016. *JIBEKA*, 11(1), 24-29.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tran, O. K., Le, H. D., & Nguyen, A. H. (2021). Role of Institutional Quality in Economic Development: A Case Study of Asian Countries. *Problems and Perspectives in Management*, 19(2).
- Wibowo, E., & Prasetya, F. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Universitas Bravijaya*.
- Widianatasari, A., & Purwanti, E. Y. (2021, Oktober). Pengaruh Kualitas Institusi, Pengeluaran Pemerintah, dan Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Ecoplan*, 4(2), 86-98.
- Widjanarko. (2021, September). Analisis Hubungan Good Governance dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2013-2019. *Jurnal Good Governance*, 17(2).
- World Bank*. (2023). Retrieved from Worldwide Governance Indicators: <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>
- Yogatama, S. A., & Hidayah, N. (2022, September). Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan ASEAN. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 16(2), 236-242.
- Zhuo, Z., O, A. S., Muhammad, B., & Khan, S. (2021). Underlying the Relationship Between Governance and Economic Growth in Developed Countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 12, 1314-1330.